

Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Nelayan di Kabupaten Jember

(Ability To Pay The Premium Of National Health Insurance For Fisherman in Jember)

Widya Noormalasari, Nuryadi, Christyana Sandra
Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
e-mail : widyanoor09@gmail.com

Abstract

National Health Insurance is an Indonesian government program which mandates by social insurance that required for all Indonesian citizens through BPJS. Coverage by independent participation in Jember is still very small that equal to 0.75 % of all participants registered. The results of a preliminary survey on the fisherman shows that 72.5 % of respondents thought unable to pay contribution JKN. The objective of this study was to calculate the ability to pay contribution of JKN for fishermen in Jember. This study was a quantitative descriptive study conducted in 3 villages, there are Puger Wetan village subdistrict Puger, Sumberejo village subdistrict Ambulu, and Lojejer village subdistrict Wuluhan. Results showed that most of respondents monthly income was middle which was in the interval \geq Rp.3.100.000,- to \leq Rp.7.750.000,- by the average was Rp.6.200.000,-; while the average household expenditure reached up to Rp.6.077.424,-. The calculation formula has got to calculate ability to pay is $\sum \text{Revenue} - (-63880 + 0,8653X_1 + 0,6361X_3 + 1,277X_4 + 1,081X_5 + 0,6571X_6 + 1,269X_7 + 1,151X_8 + 1,165X_9 + 0,9445X_{10} + 1,307X_{11} + 1,540X_{12} + 0,9707X_{13} + 1,007X_{14} + 1,159X_{15} + 0,9988X_{16} + 1,047X_{17} + 1,064X_{18} + 3,517X_{19} + 1,015X_{20})$. Most of respondents (54,5%) were able to pay the premium of National Health Insurance. Most of respondents (61,11%) were only having ability to paid the premium for in-patient care grade 3 (Rp.25.500,- for one person every month).

Keywords : Ability To Pay, National Health Insurance, Fisherman

Abstrak

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program pemerintah Indonesia yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh penduduk Indonesia melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Cakupan kepesertaan mandiri di Kabupaten Jember masih sangat sedikit yaitu sebesar 0,75% dari seluruh peserta yang telah terdaftar. Hasil survei pendahuluan pada nelayan menunjukkan bahwa sebesar 72,5% responden berpendapat tidak mampu membayar iuran JKN. Tujuan penelitian ini adalah menghitung besar kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi nelayan di Kabupaten Jember. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif yang dilakukan di tiga desa, yaitu Desa Puger Wetan - Puger, Desa Sumberejo - Ambulu, dan Desa Lojejer - Wuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan per bulan responden tergolong sedang yakni berada pada interval \geq Rp.3.100.000,- s.d \leq Rp.7.750.000,- dengan rata-rata sebesar Rp.6.200.000,-; sedangkan rata-rata total pengeluaran rumah tangga mencapai Rp.6.077.424,-. Formula perhitungan ATP yang didapatkan adalah $\text{ATP} = \sum \text{Pendapatan} - (-63880 + 0,8653X_1 + 0,6361X_3 + 1,277X_4 + 1,081X_5 + 0,6571X_6 + 1,269X_7 + 1,151X_8 + 1,165X_9 + 0,9445X_{10} + 1,307X_{11} + 1,540X_{12} + 0,9707X_{13} + 1,007X_{14} + 1,159X_{15} + 0,9988X_{16} + 1,047X_{17} + 1,064X_{18} + 3,517X_{19} + 1,015X_{20})$. Sebagian besar responden (54,5%) mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagian besar responden hanya memiliki kemampuan membayar iuran untuk rawat inap kelas 3 (Rp.25.500,- per orang per bulan).

Kata Kunci: Kemampuan Membayar, Jaminan Kesehatan Nasional, Nelayan

Pendahuluan

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini diatur dalam UU 36/2009 tentang Kesehatan yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses terhadap sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Usaha pemerintah dalam mewujudkannya telah dimulai dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), Jamkesda, dan Jamkesmas. Namun usaha untuk memenuhi hak setiap orang terhadap kesehatan masih sangat jauh, karena masih banyak penduduk Indonesia yang belum termasuk dalam kepesertaan jaminan kesehatan. Mengatasi hal tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). JKN diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah [1].

Cakupan kepesertaan JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kabupaten Jember telah mencapai 1.084.258 jiwa, yakni terdiri dari 8.126 peserta mandiri, 136.440 pengalihan peserta Askes, 3.679 Anggota TNI, 2.930 Anggota Polri, 903.963 peralihan dari peserta Jamkesmas dan 29.120 Badan Usaha [2]. Hal ini menunjukkan bahwa peserta mandiri program Jaminan Kesehatan Nasional untuk Kabupaten Jember yakni mereka yang tergolong dalam kelompok peserta bukan penerima upah masih sangat sedikit yaitu sebesar 0,75% dari seluruh peserta yang telah terdaftar. Kecilnya jumlah tenaga kerja sektor informal yang terlindungi jaminan kesehatan disebabkan rendahnya kemampuan finansial untuk membayar premi asuransi dan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan dan keselamatan kerja [3].

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain [4]. Hasil survei pendahuluan pada nelayan menunjukkan bahwa sebesar 72,5% responden berpendapat tidak mampu membayar iuran JKN. Rendahnya kemampuan membayar iuran jaminan kesehatan bagi para nelayan dapat berdampak terhadap minimnya keikutsertaan golongan pekerja tersebut terhadap program JKN.

Kemampuan membayar kesehatan (*Ability To Pay*) yaitu besarnya dana yang sebenarnya dapat dialokasikan untuk membiayai kesehatan yang bersangkutan [5]. Besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta mandiri Jaminan Kesehatan Nasional untuk kelas rawat 3 Rp.25.500, kelas rawat 2 Rp.42.500, dan kelas rawat 1 Rp.59.500 [6]. Pendekatan yang digunakan dalam analisis ATP didasarkan pada alokasi biaya untuk pemenuhan terhadap kebutuhan sehari-hari dari pendapatan rutin. Faktor yang mempengaruhi ATP kesehatan antara lain: harga barang (biaya kesehatan), pendapatan konsumen, dan jumlah anggota keluarga [7]. ATP dibagi menjadi tiga kelompok yaitu *non food expenditure*, *non essential expenditure*, dan *essential expenditure* [8]. Dalam konsep ATP, besar kemampuan membayar untuk pelayanan kesehatan adalah jumlah pengeluaran untuk barang non esensial tersebut. Asumsinya adalah kalau seseorang mampu mengeluarkan belanja untuk barang non esensial maka tentu orang tersebut juga mampu mengeluarkan biaya untuk pelayanan kesehatan yang sifatnya esensial [9].

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung besar kemampuan membayar iuran JKN bagi nelayan di Kabupaten Jember.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada rumah tangga nelayan yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember, antara lain di Kecamatan Puger, Ambulu, dan Wuluhan dan dilaksanakan pada bulan Juni - Oktober 2014.

Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja sebagai nelayan yaitu sebanyak 6.505 keluarga. Berdasarkan perhitungan rumus besar sampel yang dikembangkan dari Isaac dan Michael,

total besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 99 keluarga nelayan yang tersebar di 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Puger Wetan Kecamatan Puger, Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu, dan Desa Lojejer Kecamatan Wuluhan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *multistage random sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan modifikasi kuesioner SUSENAS milik BPS untuk memperoleh data mengenai total pendapatan keluarga dan total pengeluaran yang dibagi menjadi pengeluaran untuk pangan, non pangan dan pangan non esensial; dan dokumentasi untuk memperoleh data mengenai jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Jember.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, linearitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan model yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), dan analisis regresi model linear dengan bantuan program statistik *R-Commander* untuk mengetahui variabel-variabel yang signifikan dan koefisien dari masing-masing variabel pengeluaran.

Model persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \hat{e}$$

Keterangan:

\hat{Y} = nilai ramalan atau prediksi dari peubah atau variabel respon

X_{1-n} = nilai pengamatan dari variabel prediktor

β_0 = konstanta

β_{1-n} = koefisien kemiringan model regresi atau parameter

\hat{e} = *error terms*

Formula ATP yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$ATP = \sum \text{Pendapatan} - (\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)$$

Keterangan:

ATP = kemampuan membayar rumah tangga nelayan untuk iuran jaminan kesehatan

\sum Pendapatan = total pendapatan keluarga nelayan perbulan

X_{1-n} = variabel ATP (pengeluaran pangan, pangan non esensial, dan non pangan)

β_0 = konstanta

β_{1-n} = koefisien variabel ATP

Hasil Penelitian

Pendapatan Keluarga

Pendapatan keluarga dalam penelitian ini dihitung berdasarkan total semua penghasilan yang diperoleh tiap keluarga nelayan per bulan. Berdasarkan hasil wawancara responden (nelayan) untuk total pendapatan keluarga per bulan maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1 Pendapatan per bulan Keluarga Nelayan di Kabupaten Jember

Kategori	Pendapatan Keluarga (Rp) per bulan
Minimum	Rp. 500.000,-
Maksimum	Rp.20.800.000,-
Rata-rata	Rp. 6.200.000,-

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui rata-rata pendapatan per bulan keluarga nelayan di Kabupaten Jember adalah sebesar Rp 6.200.000,-. Selanjutnya, besarnya pendapatan keluarga juga dikelompokkan menjadi kategori pendapatan rendah, sedang, dan tinggi. Adapun distribusi pendapatan keluarga nelayan di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Distribusi Pendapatan per bulan Keluarga Nelayan di Kabupaten Jember

Pendapatan Keluarga	Interval (Rp)	Jumlah Responden N	%
Rendah	< Rp 3.100.000,-	25	25,3
Sedang	\geq Rp 3.100.000,- s.d \leq Rp 7.750.000,-	43	43,4
Tinggi	> Rp 7.750.000,-	31	31,3
Total		99	100,00

Berdasarkan tabel 2 tentang besar pendapatan per bulan keluarga nelayan di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa kelompok terbanyak (43,4%) adalah responden dengan pendapatan keluarga pada kategori sedang. Sesuai dengan hasil wawancara diketahui juga bahwa dari 99 responden terdapat 18 responden yang tidak hanya mendapatkan uang dari hasil melaut saja, tetapi ada peran istri yang ikut membantu untuk

meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Jenis usaha yang dilakukan adalah dengan membuka toko kelontong, menjual hasil tangkapan ikan di TPI, menjual makanan, menjadi instruktur senam dan buruh.

Jenis dan Total Pengeluaran

Identifikasi jenis pengeluaran rumah tangga pada penelitian ini dibedakan menjadi pengeluaran rumah tangga untuk pangan, pengeluaran untuk pangan non esensial dan pengeluaran untuk non pangan. Berikut rincian persentase rata-rata jenis dan total pengeluaran rumah tangga nelayan di Kabupaten Jember:

Tabel 3 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Nelayan Berdasarkan Penggolongan Jenisnya

Pengeluaran	Rata-rata	Persentase (%)
Pangan	Rp 1.122.303,-	18,47
Pangan Non Esensial	Rp 825.424,-	13,58
Non Pangan	Rp 4.129.697,-	67,95
Total	Rp 6.077.424,-	100,00

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui persentase terbesar rata-rata pengeluaran rumah tangga nelayan di Kabupaten Jember adalah non pangan dengan besar persentase 67,95.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan memberikan kepastian bahwa model persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik untuk model linear regresi menggunakan program statistik SPSS 11.5. Berikut hasil dari uji asumsi klasik pemodelan regresi total pengeluaran:

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas residual terhadap model regresi ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *Asymp.Sig* sebesar 0,606, yakni lebih besar dari α ($0,606 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal.

2) Uji Linearitas

Hasil pengujian menunjukkan *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini

memenuhi syarat untuk menjadi model yang baik karena asumsi linearitas terpenuhi.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dari sebuah model dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Dalam pengujian yang menggunakan jumlah data sebanyak 99 ($n = 99$) dan jumlah variabel independen sebanyak 20 ($k = 20$) serta dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 0,05$), maka diperoleh nilai $dL = 1,2230$ dan $dU = 2,1677$. Diperoleh nilai statistik Durbin Watson (d) pada model regresi total pengeluaran sebesar 2,354. Nilai d yang dihasilkan lebih besar dari dU ($2,345 > 2,1677$), sehingga dapat disimpulkan model regresi tersebut memenuhi syarat menjadi model regresi yang baik karena tidak terdapat autokorelasi positif.

4) Uji Multikolinearitas

Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan VIF (*Variance Inflationary Factor*) dan *Tolerance*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *Tolerance* kurang dari 0,100 berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas juga diuji dengan menghitung VIF (*Variance Inflating Factor*). Bila nilai VIF lebih kecil dari 5 maka tidak terjadi multikolinearitas. Semua nilai VIF pada tabel di atas menunjukkan angka kurang dari 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memenuhi syarat untuk menjadi model regresi yang baik karena tidak terjadi korelasi antar variabel independen (non-multikolinearitas).

5) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastis pada model regresi bisa dilakukan dengan uji Glejser. Pengujian ini akan memperoleh nilai sig yang nantinya akan dibandingkan dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai sig tiap variabel lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan model regresi total pengeluaran dikatakan baik karena memenuhi asumsi homokedastis.

Pemodelan Regresi Linear Berganda

Formula perhitungan *Ability To Pay* pada penelitian ini didapatkan dari pemodelan regresi

linear program statistik *R-Commander*. Berdasarkan hasil pemodelan regresi linear yang bersumber dari wawancara responden (nelayan) terkait rincian besar pengeluaran rumah tangga per bulan didapatkan hasil bahwa dari 20 variabel pengeluaran rumah tangga terdapat 13 variabel yang sangat signifikan (padi-padian, telur dan susu, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, bahan minuman, konsumsi lain, makanan dan minuman jadi, tembakau dan sirih, perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa termasuk kesehatan, pakaian, keperluan pesta), 4 variabel cukup signifikan (daging, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, barang tahan lama), 2 variabel signifikan (ikan dan pajak) dan 1 variabel yang sangat tidak signifikan (umbi-umbian).

Pemodelan regresi linear berganda untuk pengeluaran rumah tangga nelayan mencakup koefisien tiap variabel pengeluaran dan variabel-variabel yang signifikan berpengaruh terhadap besar pengeluaran keluarga nelayan di Kabupaten Jember. Model persamaan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -63880 + 0,8653X_1 + 0,6361X_3 + 1,277X_4 + 1,081X_5 + 0,6571X_6 + 1,269X_7 + 1,151X_8 + 1,165X_9 + 0,9445X_{10} + 1,307X_{11} + 1,540X_{12} + 0,9707X_{13} + 1,007X_{14} + 1,159X_{15} + 0,9988X_{16} + 1,047X_{17} + 1,064X_{18} + 3,517X_{19} + 1,015X_{20}$$

Formula ATP Iuran JKN

Selanjutnya dari pemodelan regresi pengeluaran rumah tangga nelayan yang telah diuji berdasarkan asumsi klasik model linear didapatkan formula ATP jaminan kesehatan yakni selisih antara total pendapatan tiap responden dan besar pengeluaran dengan mengimplementasikan pemodelan regresi tersebut. Formula ATP yang digunakan untuk menghitung seberapa besar kemampuan membayar nelayan untuk iuran Jaminan Kesehatan Nasional adalah sebagai berikut:

$$ATP = \sum \text{Pendapatan} - \hat{Y}$$

$$ATP = \sum \text{Pendapatan} - (-63880 + 0,8653X_1 + 0,6361X_3 + 1,277X_4 + 1,081X_5 + 0,6571X_6 + 1,269X_7 + 1,151X_8 + 1,165X_9 + 0,9445X_{10} +$$

$$1,307X_{11} + 1,540X_{12} + 0,9707X_{13} + 1,007X_{14} + 1,159X_{15} + 0,9988X_{16} + 1,047X_{17} + 1,064X_{18} + 3,517X_{19} + 1,015X_{20})$$

Besar Riil ATP Nelayan

Dengan menggunakan formula ATP yang telah didapatkan sebelumnya, berikut ini dapat dilihat gambaran besaran kemampuan membayar nelayan di Kabupaten Jember untuk iuran jaminan kesehatan nasional.

Tabel 4 *Ability To Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Nelayan di Kabupaten Jember

Kategori	<i>Ability To Pay</i> (Rp)
Minimum	Rp. 934,-
Maksimum	Rp. 85.413,-
Rata-rata	Rp. 30.736,-
Standar deviasi	Rp. 19.533,-

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa rata-rata kemampuan membayar nelayan per bulan adalah sebesar Rp 30.736,-. Selanjutnya, berdasarkan tingkatannya, *Ability To Pay* dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu tidak mampu dan mampu. Distribusi datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Distribusi *Ability To Pay* Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Nelayan di Kabupaten Jember

<i>Ability To Pay</i>	Interval (Rp)	Jumlah Responden N	(%)
Tidak Mampu	< Rp 25.500,-	45	45,5
Mampu	> Rp 25.500,-	54	54,5
Total		99	100,00

Berdasarkan tabel 5 terkait besar *Ability To Pay* iuran jaminan kesehatan nasional per bulan bagi nelayan di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden (54,5%) mampu membayar iuran. Bagi responden yang tergolong mampu akan dikategorikan lagi berdasarkan kelas rawat. Distribusi datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Distribusi Kelas Rawat Responden yang Mampu Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Kelas Rawat	Besar Iuran (Rp)	Jumlah Responden N	(%)
Kelas rawat 1	Rp 59.500,-	15	27,78
Kelas rawat 2	Rp 42.500,-	6	11,11
Kelas rawat 3	Rp 25.500,-	33	61,11
Total		54	100,00

Berdasarkan tabel 6 terkait pengkategorian kelas rawat responden yang mampu membayar iuran JKN menunjukkan bahwa sebagian besar responden (61,11%) hanya memiliki kemampuan membayar iuran untuk kelas rawat 3 yang besar iuran Rp 25.500,- per orang per bulan.

Pembahasan

Berdasarkan pengambilan data penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden berada pada tingkat pendapatan sedang dengan besar pendapatan keluarga per bulan berada pada interval \geq Rp.3.100.000,- s.d \leq Rp.7.750.000,- dan rata-rata pendapatan seluruh responden per bulan adalah sebesar Rp.6.200.000,-. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan nelayan telah melebihi UMR. Hasil tersebut telah sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa rata-rata pendapatan nelayan yang menggunakan kapal motor ataupun sampan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau telah melebihi besaran UMR di daerah tersebut [10]. Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa nelayan perahu cangkong tanpa mesin, nelayan perahu cangkong dengan mesin dan nelayan kapal motor mempunyai rata-rata pendapatan yang melebihi UMR Kabupaten Belitong Timur [11].

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terjadi karena tingkat pendapatan nelayan sangat dipengaruhi oleh jumlah hasil tangkapan ikan. Wilayah perikanan pulau Sumatera, Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Samudra Indonesia (pantai selatan). Potensi, produksi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan di wilayah tersebut relatif sama dengan keberagaman jenis ikan yang dominan sama karena berada di perairan laut yang sama [12]. Besarnya pendapatan keluarga nelayan tidak hanya berasal dari hasil melaut saja, tetapi ada peran istri yang ikut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Jenis usaha yang dilakukan adalah dengan membuka toko kelontong, menjual hasil tangkapan ikan di TPI, menjual makanan, menjadi instruktur senam dan buruh.

Rata-rata total pengeluaran rumah tangga nelayan adalah sebesar Rp.6.077.424,- dan secara berturut-turut persentase rata-rata pengeluaran pangan responden adalah 18,47%, pengeluaran pangan non esensial adalah

13,58% dan pengeluaran non pangan adalah 67,95%. Hasil tersebut tidak sesuai dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013 Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persentase yang cukup tinggi untuk jenis pengeluaran pangan dan non pangan. Berdasarkan hasil SUSENAS, persentase rata-rata jenis pengeluaran rumah tangga di Kabupaten Jember adalah 39,09% untuk jenis pengeluaran pangan, 17,96% untuk pengeluaran pangan non esensial dan 45,95% pengeluaran non pangan [13].

Perbedaan hasil penelitian ini dengan hasil SUSENAS 2013 dapat terjadi karena pola konsumsi masyarakat nelayan yang mungkin berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini terlihat dari rata-rata pengeluaran tertinggi ada pada jenis pengeluaran non pangan untuk aneka barang dan jasa yakni sebesar Rp.3.799.172,-. Besar pengeluaran tersebut terletak pada pembelian solar untuk bahan bakar perahu yang setiap harinya bisa mencapai 10 sampai 150 liter. Selain itu pengeluaran untuk tembakau atau sirih terbilang tinggi yakni sebesar Rp.376.859,- dimana jenis pengeluaran inilah yang menjadi ukuran kemampuan membayar biaya pelayanan kesehatan [14].

Berpedoman pada kuesioner milik BPS tentang Survey Sosial dan Ekonomi Nasional (SUSENAS), terdapat 20 variabel jenis pengeluaran rumah tangga yang dijadikan acuan untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil analisis pemodelan regresi program statistik *R-Commander* menunjukkan bahwa terdapat 19 variabel jenis pengeluaran yang dinyatakan signifikan mempengaruhi total pengeluaran rumah tangga responden (nelayan) dan 1 variabel lainnya dinyatakan tidak signifikan yakni jenis pengeluaran pangan berupa umbi-umbian. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel jenis pengeluaran non pangan dapat dijadikan acuan untuk perhitungan *ability to pay* kesehatan seperti yang dikemukakan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa kemampuan membayar seseorang terhadap kesehatan dapat dihitung berdasarkan pengeluaran rumah tangga non makanan, yaitu perumahan dan bahan bakar, aneka barang dan jasa, biaya pendidikan, pakaian, bahan tahan lama, pajak dan asuransi, keperluan pesta dan upacara adat, dan biaya kesehatan [15].

Kesesuaian hasil penelitian ini dengan teori perhitungan ATP kesehatan terjadi karena konsep kemampuan membayar itu dikembangkan dari perspektif *coping strategic* yang mencakup berbagai upaya yang dilakukan individu atau keluarga dalam memobilisasi sumberdaya yang sifatnya tidak rutin untuk membayar suatu produk atau jasa yang mereka perlukan, dalam hal ini adalah asuransi kesehatan yang sifatnya esensial dan besarnya dapat dilihat dari jumlah pengeluaran keluarga untuk barang yang sifatnya non esensial.

Pada penelitian ini didapatkan hasil sebagian besar responden (54,5%) mampu membayar iuran JKN dengan rata-rata sebesar Rp.30.736,- per orang. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden atau masyarakat nelayan memiliki kemampuan membayar iuran JKN untuk kelas rawat 3 yang nominalnya sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan. Hasil tersebut telah sesuai dengan harapan Pemerintah Indonesia yang tertera pada visi BPJS Kesehatan yakni mengharuskan seluruh penduduknya ikut berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, yang artinya setiap orang harus mempunyai kemampuan membayar minimal Rp.25.500,- untuk dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi pembiayaan kesehatan yang menganut model asuransi sosial.

Kesesuaian hasil penelitian dengan harapan Pemerintah terjadi karena besar pendapatan keluarga nelayan yang telah melebihi UMR, hal ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemampuan membayar seseorang terhadap biaya kesehatan. Pernyataan bahwa sebagian besar responden hanya mampu membayar iuran untuk kelas rawat 3 dengan nominal Rp.25.500,- per orang per bulan dikarenakan minimnya *saving money* akibat rata-rata pengeluaran non esensial yang sangat tinggi dan jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Rata-rata responden memiliki perilaku yang konsumtif terhadap pengeluaran non esensial seperti rokok. Rata-rata *ability to pay* responden yang sebesar Rp 30.736,- hanya 0,5% dari rata-rata pendapatan keluarga nelayan per bulan, sedangkan rata-rata pengeluaran untuk tembakau dan sirih mencapai 5,93% dari pendapatan keluarga per bulan. Jika rumah tangga mampu menekan pengeluaran untuk keperluan non esensial seperti rokok, maka bukan tidak mungkin kemampuan membayar masyarakat nelayan terhadap iuran JKN dapat lebih tinggi lagi.

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan juga memiliki pengaruh terhadap kemampuan membayar. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak jumlah anggota keluarga akan semakin besar pula alokasi dana yang harus disediakan setiap keluarga untuk membayar iuran jaminan kesehatan. Sesuai dengan teori bahwa *Ability To Pay* seseorang dipengaruhi oleh harga barang (biaya kesehatan), besar pendapatan, dan jumlah anggota keluarga [7].

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang kemampuan membayar iuran JKN bagi nelayan di Kabupaten Jember, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Besar pendapatan keluarga responden per bulan terbanyak berada pada kategori sedang yakni berada pada interval \geq Rp.3.100.000,- s.d \leq Rp.7.750.000,- dengan rata-rata pendapatan per bulan sebesar Rp.6.200.000,. Rata-rata jenis pengeluaran terbesar ada pada pengeluaran non pangan yaitu Rp.4.129.141,-, pengeluaran pangan sebesar Rp.1.139.232,-, dan pengeluaran untuk pangan non esensial sebesar Rp.845.636,- dengan rata-rata total pengeluaran rumah tangga mencapai Rp.6.077.424,- per bulan. b) Formula perhitungan kemampuan membayar iuran JKN bagi nelayan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{ATP} &= \sum \text{Pendapatan} - \hat{Y} \\ &= \sum \text{Pendapatan} - (-63880 + 0,8653X_1 + \\ &0,6361X_3 + 1,277X_4 + 1,081X_5 + 0,6571X_6 + \\ &1,269X_7 + 1,151X_8 + 1,165X_9 + 0,9445X_{10} + \\ &1,307X_{11} + 1,540X_{12} + 0,9707X_{13} + \\ &1,007X_{14} + 1,159X_{15} + 0,9988X_{16} + \\ &1,047X_{17} + 1,064X_{18} + 3,517X_{19} + 1,015X_{20}). \end{aligned}$$

c) Sebagian besar responden (54,5%) mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil pemaparan menunjukkan bahwa sebanyak 33 responden memiliki kemampuan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk kelas rawat 3 yang besar nominalnya adalah Rp.25.500,- per orang per bulan.

Adapun beberapa saran yang diberikan oleh peneliti adalah: 1) Masyarakat nelayan diharapkan dapat mengurangi jumlah pengeluaran yang bersifat non esensial seperti pengeluaran untuk rokok dan arisan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya alokasi biaya untuk kesehatan, dapat dilakukan sosialisasi atau penyuluhan oleh petugas kesehatan dan membentuk suatu perkumpulan dibawah pengawasan Kepala Desa yang berfungsi seperti koperasi khusus bagi nelayan. 2) Pihak BPJS Kesehatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait adanya peran serta kader kesehatan disetiap desa nelayan guna membantu dalam kegiatan pengumpulan besaran iuran yang dapat dilakukan setiap hari dengan menerapkan sistem tabungan. 3) Kader kesehatan diharapkan dapat berperan aktif dalam pengumpulan iuran dan membantu kepentingan administrasi bagi pasien atau pengguna kartu BPJS Kesehatan di daerah tersebut. 4) Bagi peneliti selanjutnya dapat dilakukan pengembangan penelitian dalam hal jumlah responden guna mendapatkan sampel populasi yang lebih banyak, jumlah variabel pengeluaran yang dianalisis untuk meminimalisir error sehingga nilai hasil estimasi semakin mendekati nilai sebenarnya dan jenis responden yang lebih spesifik mengingat terdapat beberapa jenis nelayan dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda.

Daftar Pustaka

- [1] Indonesia. Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150. Jakarta: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40; 2004
- [2] Koran Radar Jember. Peserta Mandiri BPJS Kesehatan Masih Rendah. Jember; 11 Maret 2014. p. 38
- [3] Ramdan I. Memperbaiki Kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Sektor Informal Melalui Program Corporate Social Responsibility Perusahaan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan; 2012. Vol **15(1)**: 2-6
- [4] Kusnadi. Nelayan Strategi Adaptasi dan jaringan Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press; 2002
- [5] Kemenkes RI. Pedoman Penetapan dan Koleksi Premi JPKM. Jakarta; 2001
- [6] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan; Jakarta. 2014
- [7] Faiz A. Studi Kemampuan-Kemauan Membayar Konsumen Jasa Angkutan Umum Bus Damri-Ekonomi di Kota Surabaya. Media Informasi & Komunikasi Aplikasi Teknik Sipil Terkini; 2006. Vol. **1(1)**
- [8] Russel S. Ability to Pay for Health Care: Concepts and Evidence. Health Policy and Planning; 1996. Vol **11(3)**: 219-37
- [9] Adisasmita W. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Jakarta: FKM UI; 2008
- [10] Hendrik. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau. Jurnal Perikanan dan Kelautan; 2011. Vol **16(1)**: 21-32
- [11] Pratama. Analisis Pendapatan Nelayan Tradisional Pancing Ulur di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Jurnal Perikanan dan Kelautan; 2012. Vol **3(3)**: 107-116
- [12] Adisanjaya N. Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia dan Permasalahannya; (Tanpa Tahun)
- [13] Badan Pusat Statistik. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Provinsi Jawa Timur. Surabaya; 2013
- [14] Susilowati. Rumus Perhitungan ATP dan WTP. Jogjakarta; 2001
- [15] Gani A. Kemampuan Membayar (ATP) dan Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan. Tesis. FKM-UI; 1997